

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Stakeholder

Stakeholder ialah orang memiliki kepentingan dalam bisnis. Stakeholder ialah seluruh pihak di dalam warga, baik itu orang, komunitas, ataupun kelompok warga, yang mempunyai ikatan serta kepentingan terhadap suatu organisasi ataupun industri serta isu ataupun kasus yang lagi dinaikan.²⁰ Bisa dikatakan selaku stakeholder bila mereka mempunyai ciri semacam mempunyai kekuasaan serta kepentingan di dalam organisasi maupun industri.²¹

Stakeholder ialah bagian berarti dalam sesuatu organisasi yang mempunyai kedudukan aktif buat meningkatkan tujuannya. Stakeholder bisa ditemukan, paling utama dalam aktivitas bisnis sehingga tiap industri tidak lepas dari keberadaan tokoh berarti tersebut. Keberadaan stakeholder dalam aktivitas bisnis hendak dibutuhkan buat menolong meningkatkan tujuan dari industri tersebut. Stakeholder dalam bisnis meliputi pemegang saham, karyawan, staf, pegawai, penyuplai, distributor ataupun konsumen.²²

Bagi Teori Stakeholder tujuan industri didirikan bukan cuma buat menggapai keuntungan yang diharapkan serta penuhi kepentingannya sendiri, tidak hanya tujuan tersebut industri wajib bisa membagikan khasiat untuk para stakeholder nya. Teori stakeholder seluruhnya tidak berubah- ubah dengan maksimasi nilai ataupun sikap pencarian nilai, yang menyiratkan kalau manajer wajib mencermati seluruh konstituen sehingga bisa pengaruhi nilai industri.²³

²⁰ Indra Mahardika Putra, *Business Model and Business Plan di Era 4.0*, (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019) 5.

²¹ Dana Prihadi, *Pengenalan Dasar Manajemen Publik Relasi*, (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2020) 83-84.

²² Indra Mahardika Putra, *Business Model and Business Plan di Era 4.0*, 5.

²³ Reistiawati Utami and Meina Wulansari Yusniar, "Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Dan Good Corporate

Adanya teori *stakeholder* pada penelitian ini akan membuat perusahaan lebih sadar bahwa beradaptasi dengan *stakeholder* sangat berpengaruh dalam perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan ISR pada *annual report* yang akan dipublikasikan supaya lebih transparan untuk dapat menarik perhatian para investor. Hal ini berdampak positif terhadap perusahaan yaitu dapat membuat perusahaan mengalami peningkatan.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi ialah sistem pengelolaan industri yang terjalin antara warga serta area disekitar industri serta memakai sumber ekonomi. Teori legitimasi ialah kontrak sosial yang terjalin antara area dengan warga yang terletak disekitar industri tersebut beroperasi serta memakai sumber ekonomi. Legitimasi ialah aspek yang sangat strategis dicoba dengan integritas penerapan etika dalam berbisnis serta tingkatkan tanggung jawab sosial industri yang berguna buat tingkatkan citra industri.²⁴

Teori legitimasi menegaskan kalau pengkonsistensian penerapan norma sosial maupun area diterapkan oleh industri dalam melakukan sistem pengoperasiannya, supaya kegiatan industri diterima oleh pihak luar selaku sesuatu yang legal. Apabila industri melaksanakan pengungkapan sosial, hingga industri hendak memperoleh status dari warga serta area ataupun bisa dikatakan terlegimitasi dimana perusahaan itu beroperasi. Industri melaksanakan pengungkapan *islamic social reporting* akibat dalam rangka menyeimbangkan tuntutan sosial, ekonomi, politik, serta dari luar industri. Sehingga industri hendak menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan

Governance (Gcg) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening,” *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 165.

²⁴ Lila Pratiwi dan Endang Dwi retnani, “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reprotng (ISR),” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, No. 2 (2020):3.

melaksanakan apa yang di idamkan warga supaya industri menemukan pengakuan keberadaannya.²⁵

Penggunaan teori pada penelitian ini memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat, sehingga perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Teori legitimasi berguna bagi perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya bias diterima oleh masyarakat.

Keterkaitan dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit dapat mendorong manajemen, selaku pelaksanaan operasi perusahaan untuk mengungkapkan ISR, supaya fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Sementara keterkaitan faktor leverage dengan pengungkapan ISR berdasarkan teori legitimasi dapat dijelaskan melalui rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang lebih rendah.

3. Islamic Social Reporting (ISR)

a. Pengertian ISR

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan wujud tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang diterapkan pada entitas syariah tercantum di dalamnya perbankan syariah.²⁶ *Islamic*

²⁵ Wahyu Rofiquurutaf, “Pengaruh *Corporate Governance Preception Index (CGPI), Islamic Social Reporting (ISR) Dan Sustainability Report (SR)* Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2014-2017,” (Skripsi Iain Salatiga: 2019), 12.

²⁶ Miftahul Hasan dan Mohammad Rafki Nazar, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Terhadap Islamic Social Reporting (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2019),” *e-Proceeding of Management* 8, no. 2 (2021): 1144.

Social Reporting sama semacam *Corporate Social Reporting* ialah komitmen suatu industri maupun dunia bisnis buat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendengarkan tanggung jawab terhadap industri dan menitik beratkan pada keseimbangan antara kepedulian terhadap aspek murah, sosial dan kawasan.²⁷

Islamic Social Reporting (ISR) sangat diperlukan oleh warga muslim dengan tujuan menunjukkan akuntabilitas kepada Allah SWT serta warga serta buat meningkatkannya dengan membagikan data yang relevan buat kebutuhan religius para pengambil keputusan Muslim. Pelaporan sosial dalam perspektif syariah yang berhubungan dengan uraian tentang akuntabilitas, keadilan sosial serta kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh konsep Tauhid, yang menegaskan kalau seluruh suatu wajib dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT serta seluruh suatu yang dicoba wajib cocok dengan perintah- Nya. Dalam konsep kepemilikan, Islam mengakui keberadaan orang, tetapi pada hakekatnya seluruh suatu merupakan kepunyaan Allah SWT, owner bertanggung jawab memakai sumber energi yang dimoft cocok perintah AllahSWT serta tujuan buat “*rahmatan lilalamin*(rahmat untuk segala alam)”.²⁸

b. Konsep *Islamic Social Reporting* (ISR)

Sebagai standar ketaatan makhluk hidup kepada sang pencipta dengan tidak membuat kerusakan dimuka bumi, berdasarkan perintah dalam Al-quran surah Al-A'raf (56): “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)*

²⁷ Maya Mahani Pratiwi, “Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018” (Skripsi Iain Salatiga: 2019), 149.

²⁸ A. Rio Makkulau Wahyu dan Ariyanto, “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bni Syariah Dengan Indeks Islamic Social Reporting,” *Jurnal Lembaga Keuangan and Bisnis Islam* 3, No. 1 (2021): 3-4.

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tindakan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".²⁹ Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk mengganggu bentuk penciptaan muka bumi dan segala isinya. Sehingga, sebagai makhluk Allah SWT mempunyai tanggungjawab dalam menjaga ciptaan Allah. Tanggungjawab ini adalah bukti dasar dari akuntabilitas dalam perekonomian Islam. Akuntabilitas diartikan untuk mendapatkan pengungkapan yang baik, adil serta transparan. Dari segi akuntabilitasnya bukan hanya diberikan kepada pemegang kepentingan melainkan bentuk tanggungjawab kepada Allah sang pemilik segala sesuatu.

Tujuan perspektif dari *social reporting* dalam adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu memberikan akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat lingkungan.
- 2) Menambah tingkatan transparansi kegiatan lembaga dengan memberikan pemberitahuan yang berkaitan dengan tingkat korelevanan dengan melihat kepentingan penginvestoran muslim untuk pengambilan keputusannya.³⁰

c. Tema Pengungkapan dalam Indeks ISR

Tema- tema pengungkapan dalam indeks ISR berbentuk tema investasi serta keuangan, tema produk serta jasa, tema tenaga kerja, tema sosial, tema area serta tema tata kelola industri. Berikut ini tema- tema ISR yang digunakan dalam riset ini, antara lain:

- 1) Keuangan dan Investasi

Pengungkapan pada tema ini merupakan aplikasi operasional yang memiliki keribaan, kegharapannya, kegiatan pengelolaan zakat Salah

²⁹ Terjemah Al-quran surah Al-A'raf Ayat 56.

³⁰ Kasmawati et al., "Pengaruh Kepatuhan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Bni Syariah Makassar," *Economic Bosowa Journal* 6, No.005 (2020): 3-4.

satu wujud riba di dunia perbankan merupakan pemasukan serta beban bunga. Buat menjunjung besar nilai keterbukaan kepada warga, segala sumber pembiayaan serta investasi yang memiliki riba serta gharar wajib diidentifikasi serta dilaporkan secara detail.

Aspek lain yang diungkapkan merupakan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang. Terpaut dengan kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang serta kebangkrutan klien. Buat meminimalisir efek pembayaran, Bank Indonesia mewajibkan bank buat mencadangkan penghapusan untuk aktiva- aktiva produktif yang bisa jadi bermasalah, aplikasi ini diucap pencadangan penghapusan piutang tidak tertagih.

Item berikutnya merupakan tipe investasi yang dilkaskan oleh bank syariah serta proyek pembiayaan yang dijalankan, aspek ini lumayan diungkapkan secara universal.

2) Produk dan Pelayanan

Aspek yang butuh diungkapkan pada tema ini merupakan status kehalalan produk yang digunakan serta pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, hingga status kehalalan produk serta jasa baru yang digunakan merupakan lewat opini yang di informasikan oleh DPS buat tiap produk serta jasa terbaru.

Identifikasi menimpa halal ataupun haram sesuatu produk ataupun jasa harus diungkapkan dalam laporan. Secara logis, tujuannya supaya para pemangku kepentingan mengenali apakah benda ataupun jasa tersebut diperbolehkan(halal) ataupun dilarang (keharamannya) dalam ajaran keislaman. Tidak hanya itu pelayanan atas keluhan nasabah pula jadi prioritas bank syariah dalam rangka melindungi keyakinan nasabah.³¹ Hal ini

³¹ Maya Mahani Pratiwi, “Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap profitabilitas

merupakan peraturan “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengenai hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya”.³² Perihal lain yang wajib diungkapkan merupakan glossary ataupun definisi tiap produk dan akad-akad yang melandasi produk tersebut. Perihal ini mengingat akad-akad di bank syariah memakai istilah-istilah yang masih asing bagi warga, sehingga butuh data terpaut definisi akad-akad tersebut supaya gampang dimengerti oleh pengguna data.

3) Tenaga Kerja

Konsep dasar yang mendasari tema ini merupakan etika amanah serta keadilan. Karyawan wajib diperlakukan secara adil serta dibayar secara normal, pemebri kerja pula wajib penuhi kewajiban terhadap karyawan dalam perihal kebutuhan spiritual mereka. Tidak hanya itu warga mau mengenali apakah industri menanggulangi para karyawan dengan adil, ialah lewat data semacam pendapatan, ciri pekerjaan, hari kerja serta hari libur, jaminan kesehatan serta kesejahteraan, kebijakan terpaut waktu serta tempat ibadah, pembelajaran serta pelatihan kepada karyawan, peluang yang sama serta area kerja, serta apresiasi terhadap karyawan yang mempunyai prestasi baik. Aspek lain merupakan kebijakan remunerasi buat karyawan, kesehatan serta keselamatan kerja, tempat ibadah yang mencukupi, waktu ataupun aktivitas keagamaan.³³

Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018,” 40-41.

³² UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Maya Mahani Pratiwi, “Pengaruh Islamic Social Reporting (ISR) Dan Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018,” 40-42.

4) Masyarakat

Konsep awal yang menjadi pondasi pada tema ini merupakan *ummah*, *amanah* serta *adl*. Konsep inilah menitik beratkan pada berartinya silih berbagi serta silih meringankan beban warga. Islam menekankan kepada umatnya buat silih tolong membantu antar sesama. Wujud silih berbagi serta tolong membantu untuk Bank Syariah bisa dicoba dengan sedekah, wakaf, serta *qard*. Sebagian aspek pengungkapan tema warga yang digunakan dalam riset ini merupakan sedekah, wakaf, serta *qard*. Sebaliknya sebagian aspek lain antara lain merupakan dorongan kesehatan, pemberian beasiswa di bidang pembelajaran, serta sokongan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan.

5) Lingkungan

Konsep awal yang menjadi pondasi pada tema ini merupakan mizan, khilafah, serta akhirah. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip penyeimbang, kesederhanaan, serta tanggung jawab dalam melindungi lingkungannya.

6) Tata Kelola Perusahaan

Konsep awal yang menjadi pondasi pada tema ini merupakan konsep khilafah. Tema tata kelola industri dalam Islamic Social Reporting (ISR) ini tidak dapat dipisahkan dari industri guna membenarkan pengawasan pada aspek syariah industri.³⁴

4. Good Corporate Governance (GCG)

a. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Istilah Corporate Governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Dalam modul ini, istilah Corporate

³⁴ Indriarti Laras Putri, "Pengaruh Islamic Governance Score, Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019," (Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020) 23-25.

Governance dan tata kelola perusahaan tersebut dipergunakan secara bergantian.³⁵

GCG ialah usaha untuk mengasosiasikan konflik agar tidak berdampak negatif pada perusahaan agar pada waktu dekat maupun dalam waktu yang panjang. Agar GCG berperan dengan baik, ada empat kelompok perlu berhubung satu sama lain: tersedianya jaminan hukum atau hukum yang kuat, menjaga akuntabilitas, serta kemampuan direksi dan manajer untuk saling membantu.³⁶

“*Good Corporate Governance*” selaku kumpulan hukum, peraturan serta kaidah-kaidah yang harus dipadati yang bisa mendesak kinerja sumber-sumber industri bekerja secara efektif, menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan untuk para pemegang saham ataupun warga dekat secara totalitas.³⁷

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa “*Good Corporate Governance*” ialah seperangkat peraturan yang memiliki strategi dalam mengatur hubungan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang dipakai untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, menciptakan kondisi yang efisien, transparan dan konsisten dengan undang-undang.³⁸

³⁵ Dedi Kusmayadi et al., *Good Corporate Governance*. (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015). 8.

³⁶ Salina et al., “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia (Periode 2017-2019),” *E-JRA* 10, No.02 (2021): 120.

³⁷ Cika Nirmalasari et al., “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Return on Assets dan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening,” *Ubhara Accounting Journal* 1, No. 1 (2021): 133.

³⁸ Raina Betaria Sere Sinambela, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017),” (Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019): 12.

b. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Khasiat dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan:

- 1) Meningkatkan kinerja industri lewat terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional industri dan lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- 2) Memudahkan diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (sebab aspek keyakinan) yang pada akhirnya hendak meningkatkan corporate value.
- 3) Mengembalikan keyakinan investor buat menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham hendak merasa puas dengan kinerja industri sebab sekalian hendak meningkatkan shareholders value serta deviden.

Good Corporate Governance mempunyai 5 tujuan utama ialah:

- 1) Perlindungan kewajiban serta berkepentingan pemegang sahamnya.
- 2) Perlindungan kewajiban serta berkepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham. Meningkatkan penilaian industri serta pada pengelola sahamnya.
- 3) Meningkatkan efisiensi serta efektifitas kerja Dewan Pengurus ataupun *Board of Directors* serta manajemen industri.
- 4) Meningkatkan kualitas ikatan Board of Directors dengan manajemen senior industrinya.³⁹

c. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

- 1) **Transparansi**
Keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengemukakan data materil serta relevan menimpa industri.

³⁹ Dedi Kusmayadi et al., *Good Corporate Governance*. 16.

2) Kemandirian

Kondisi di mana industri dikelola secara handal tanpa benturan kepentingan serta tekanan dari pihak mana juga yang tidak cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3) Akuntabilitas

Kejelasan guna, penerapan serta pertanggungjawaban organ industri sehingga pengelolaan industri terlaksana secara efisien.

4) Pertanggungjawaban

Kesesuaian dalam pengelolaan industri terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan serta kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang mencuat bersumber pada perjanjian serta tata perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

5. Ukuran Dewan Komisaris

a. Pengertian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan inti pelaksanaan “*corporate governance*”.⁴¹ Dewan komisaris merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan *optimalisasi* peran anggota komisaris dalam penyelenggaraan “*Good Corporate Governance*”. Dewan komisaris merupakan total dari keseluruhan komisaris perusahaan baik yang berasal

⁴⁰ Avicenna Abdurrahman, “Implementasi Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Framework dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Kasus pada PT Reasuransi Syariah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 10, No.1 (2021): 5.

⁴¹ Shafira Yasmien, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility,” *e-Proceeding of Management* 7, No.2 (2020): 3177.

dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan atau komisaris *independent*.⁴²

Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dengan demikian, semakin besar komposisi komisaris, maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan dan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dalam pengungkapan CSR secara lebih luas dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR⁴³

b. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki berbagai tugas seperti berikut ini:

- 1) Membuat risalah rapat dewan komisaris serta menaruh kopian rapat.
- 2) Memberi tahu kepada perseroan tentang kepemilikan saham serta ataupun keluarga atas saham perseroan serta saham di perseroan lain.
- 3) Membagikan laporan tentang tugas pengawasan yang sudah dicoba.
- 4) Mengawasi direktur.

Dewan komisaris pula mempunyai wewenang buat berikan persetujuan atas dorongan kepada direksi dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu semacam diatur dalam Pasal 117 UU PT.

⁴² Gatot Nazir Ahmad, “Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018,” *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 11, No.1 (2020): 176.

⁴³ Ni Luh Eka Krisma Yanti et al., “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility,” *Jurnal Kharisma* 3, No. 1 (2021): 44-45.

5) Pengajuan Pailit.

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Majelis hukum Niaga saat sebelum mendapatkan persetujuan RUPS, dengan tidak kurangi syarat sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perihal kepailitan sebagaimana diartikan, terjalin sebab kesalahan ataupun kelalaian Direksi serta harta pailit tidak lumayan buat membayar segala kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, tiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab sebagaimana diartikan pada ayat 2 berlaku pula untuk anggota Direksi yang salah ataupun lalai yang sempat berprofesi selaku anggota Direksi dalam jangka waktu 5(5) tahun saat sebelum vonis statment pailit diucapkan. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana diartikan pada ayat(2) apabila bisa meyakinkan:

- a) Kepailitan tersebut bukan sebab kesalahan ataupun kelalaiannya;
- b) Sudah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati- hatian, serta penuh tanggung jawab buat kepentingan Perseroan serta cocok dengan iktikad serta tujuan Perseroan;
- c) Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas aksi pengurusan yang dicoba;
- d) Sudah mengambil aksi buat menghindari terbentuknya kepailitan.⁴⁴

⁴⁴ Tri Siwi Nugrahani, "Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Pada Kualitas Laporan Keuangan," *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 843.

6. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah(DPS) yakni istilah umum yang digunakan di Indonesia buat menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. DPS dalam perbankan syariah yakni pembeda dari perbankan konvensional. Kesyariahan sesuatu perbankan syariah terletak pada pundak mereka.⁴⁵

DPS merupakan lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional serta aplikasi LKS supaya senantiasa tidak berubah- ubah serta berpegang teguh kepada prinsip syariah.⁴⁶ “Pedoman Dasar **DSN (bab II ayat 5)** mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan”.⁴⁷

DPS merupakan Lembaga yang digunakan buat membenarkan kalau bank syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengenali kerangka serta batas syariah, serta menginvestasikan ataupun tingkatkan kapasitas buat batas- batas ini.⁴⁸

⁴⁵ Nia Faradilla, “*Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*,” 18.

⁴⁶ M.Taufiq, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, No.1 (2020): 133-134.

⁴⁷ M.Taufiq, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” 79.

⁴⁸ M.Taufiq, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” 134.

b. Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah

Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah ialah berikut:

- 1) Selaku penasihat serta pemberi anjuran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah serta pimpinan kantor cabang syariah menimpa hal-hal yang terpaut dengan aspek syariah.
- 2) Selaku mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul serta anjuran pengembangan produk serta jasa dari lembaga keuangan syariah yang membutuhkan kajian fatwa dari DSN.⁴⁹

Peran Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan yang dijalankan dilembaga syariah supaya senantiasa cocok dengan syarat syarat syariah.
- 2) Dewan syariah wajib membuat statment secara berkala kalau lembaga keuangan syariah yang dipantainya sudah berjalan cocok ketentuanketentuan syariah.
- 3) Mempelajari serta membuat saran produk baru.
- 4) Melaksanakan sosialisasi kepada warga tentang lembaga keuangan syariah lewat berberapa media yang telah berjalan serta berlaku di warga, semacam khutbah, majelis ta' lim, pengajian-pengajian, ataupun lewat diskusi teratur dengan para tokoh agama serta warga.⁵⁰

⁴⁹ Anik Lestari, "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Ngawi," (Skripsi Iain Ponorogo, 2020) 16-17.

⁵⁰ Nia Faradilla, "*Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*," 18.

7. Ukuran Komite Audit

a. Pengertian Komite Audit

Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam “Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan”.⁵¹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menyatakan bahwa Komite Audit harus beranggotakan paling sedikitnya 3 (tiga) orang anggota serta salah satu anggota berasal dari Komisaris Independen atau pihak luar yang merangkap sebagai ketua komite audit, lalu memiliki minimal 1 (satu) anggota yang memiliki spesialisasi di bidang akuntansi maupun keuangan, wajib mengadakan rapat rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya”.⁵²

b. Fungsi Komite Audit

Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris yaitu

- 1) Tingkatkan mutu Laporan Keuangan.
- 2) Menghasilkan hawa disiplin serta pengendalian yang bisa kurangi peluang terbentuknya penyimpangan dalam pengelolaan industri.
- 3) Tingkatkan efektifitas guna internal audit(SPI) ataupun eksternal audit.

⁵¹ Rinitami Njatrijani et al., “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan,” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 262.

⁵² Nazila Alfiyasahra dan Auliffi Ermian Challen, “Pengaruh Kualitas Komite Audit dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Manajemen Laba,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9, No.1 (2020): 40.

- 4) Mengenali hal- hal yang membutuhkan atensi Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.⁵³

8. Leverage

a. Pengertian Leverage

Leverage ialah rasio yang digunakan buat mengukur sepanjang mana aktiva industri dibiayai dengan utang.⁵⁴ Dalam kegiatan bisnis, industri senantiasa dihadapkan dengan pengeluaran anggaran yang bertabiat senantiasa, yang tentu saja mempunyai dampak. Berkaitan dengan itu pihak manajemen harus tahu menimpa Leverage dan Leverage mempunyai bayaran tetap dalam usaha yang menghasilkan keuntungan. Ada jalinan yang sangat erat antara Leverage dengan struktur modal dan pembelanjaan.⁵⁵

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Leverage mencuat sebab dalam operasinya industri memakai aktiva serta sumber dana yang memunculkan beban senantiasa, yang berbentuk bayaran penyusutan dari aktiva senantiasa, serta bayaran bunga dari hutang.

Bila industri memakai sumber pembiayaan dari luar(modal asing) hingga beban senantiasa yang ditanggung merupakan bunga pinjaman, sebaliknya apabila industri memakai mesin- mesin hingga beban tetapnya berbentuk bayaran penyusutan mesin- mesin(depresiasi), serta bila industri menyewa sesuatu aktiva senantiasa kepada pihak lain, hingga konsekuensinya ialah wajib membayar bayaran senantiasa berbentuk

⁵³ Rinitami Njatrijani et al., “Hubungan Hukum Dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan,” 262.

⁵⁴ Maya Eriska et al., “Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019,” *Jurnal Revenue* 1, No.01 (2020): 135.

⁵⁵ Kautsar Tanjung, “Analisis Pengaruh Leverage Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar Di BEI,” (Skripsi Universitas Lampung, 2017), 17.

bayaran sewa. Bersumber pada penafsiran tersebut hingga beban senantiasa yang ditanggung oleh industri bergantung tipe sumber dana serta peninggalan yang pakainya.⁵⁶

Rasio leverage rasio yang digunakan mengevaluasi sepanjang mana asset industri dibiayai oleh hutang. ini berarti seberapa besar beban utang dibanding dengan aktivitas industri. secara universal bisa dikatakan kalau rasio leverage berperan mengukur keahlian industri dalam penuhi kewajiban jangka pendek serta panjangnya sepanjang likuidasinya.⁵⁷

b. Pembagian Leverage

Manajemen keuangan diketahui 2 ragam Leverage, yakni Leverage Operasi (Operating Leverage) serta Leverage Keuangan (Financial Leverage). Pemakaian kedua Leverage ini mempunyai tujuan agar keuntungan yang didapat lebih besar dari anggaran Asset serta sumber dananya. Dengan demikian, pemakaian Leverage hendak tingkatkan keuntungan untuk pemegang saham. Kebalikannya Leverage pula bisa tingkatkan efek kerugian. Bila industri menemukan keuntungan yang lebih rendah dibanding dengan anggaran tetapnya hingga pemakaian Leverage hendak menyusutkan keuntungan pemegang saham.⁵⁸

1) Leverage Operasi (Operating Leverage)

Operating Leverage terjalin pada dikala industri memakai aktiva yang memunculkan bayaran ataupun beban senantiasa. Operating leverage(leverage pembedahan) merupakan energi ungkit faktor bayaran senantiasa operasional

⁵⁶ Pristina Nur Andayani, “Pengaruh Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Perusahaan Property Real Estate yang Terdaftar di BEI (2014-2018),” (Skripsi Universitas Medan Area, 2020) 12.

⁵⁷ Depi Srimayanti, “Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia,” (Skripsi Universitas Putera Batam, 2021) 20.

⁵⁸ Kautsar Tanjung, “Analisis Pengaruh Leverage Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar Di BEI,” 17.

semacam bayaran depresiasi, bayaran administrasi serta universal terhadap kenaikan laba pembedahan(EBIT) yang dihasilkan. Operating leverage merupakan bauran relatif bayaran senantiasa serta bayaran variabel yang hendak terdapat dalam suatu organisasi. Operating leverage bisa mengukur pergantian pemasukan ataupun penjualan terhadap keuntungan pembedahan industri. Dilihat dari khasiat operating leverage, bisa di simpulkan kalau industri bisa mengenali pergantian laba pembedahan selaku akibat pergantian laba pembedahan selaku akibat pergantian penjualan, sehingga industri bisa mengenali keuntungan pembedahan industri.⁵⁹

2) **Leverage Keuangan (Financial Leverage)**

Financial leverage merupakan pemakaian sumber dana yang mempunyai beban senantiasa dengan berpikiran kalau hendak membagikan bonus keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga hendak tingkatan keuntungan yang ada untuk pemegang saham (Sartono, 2010: 263). Kebijakan industri memperoleh modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan, ialah pelaksanaan dimana industri, membiayai kegiatannya dengan memakai modal pinjaman dan menanggung sesuatu beban senantiasa yang bertujuan buat tingkatan laba per lembar saham. Leverage keuangan mencuat sebab terdapatnya kewajibankewajiban finansial yang sifatnya senantiasa (fixed financial charges) yang wajib dikeluarkan oleh industri. Kewajiban- kewajiban finansial yang senantiasa ini bukanlah berganti

⁵⁹ Yoga Ramadhan dan Andhika Napitupulu, “Pengaruh Operating Leverage dan Financial Leverage Terhadap Earning Per Share (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2019),” Jurnal Akuntansi dan Perpajakan 2, No.2 (2021) 106.

dengan terdapatnya pergantian tingkatan EBIT serta wajib di bayar tanpa memandang sebesar apa juga tingkatan EBIT yang dicapai industri.⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Buat menampilkan kalau riset ini belum terdapat, hingga periset hendak menguraikan riset terdahulu yang telah terdapat. Dari perihal ini, nantinya periset hendak menjadikan selaku teori serta perbandingan dalam mengupas bermacam kasus riset ini, sehingga mendapatkan temuan baru yang lebih baik. Antara lain periset paparkan selaku berikut:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Lila Pratiwi Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.9 No.2 2020 ⁶¹	“Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan terhadap Pegungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> ”	“Ukuran Dewan Komisaris dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) sedangkan Komite Audit dan Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)”.

⁶⁰ Pristina Nur Andayani, “Pengaruh Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Perusahaan Property Real Estate Yang Terdaftar Di Bei (2014-2018),” 15-16.

⁶¹ Lila Pratiwi, “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pegungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9, No.2 (2020).

2.	Tanti Safitri Skripsi Universitas Lampung 2020 ⁶²	“Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , <i>Company Age</i> dan <i>Islamic Good Corporate</i> terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (Studi pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018)”	“Tingkat leverage, company age dan Islamic good corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018 sedangkan <i>profitability</i> dan <i>Company size</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018”.
3.	Yogi Dwi Lestari Jurnal Ekonomi	“Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas,	“Ukuran bank, profitabilitas, kepemilikan

⁶² Tanti Safitri, “Pengaruh *Leverage*, *Profitability*, *Company Age* dan *Islamic Good Corporate* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018),” (Skripsi Universitas Lampung, 2020).

	<p>dan Studi Kebijakan Vol 01 No. 01 Desember 2020⁶³</p>	<p>Kepemilikan Institusional Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>”</p>	<p>institusional, ukuran dewan pengawas syariah, dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> bank umum syariah di Indonesia sedangkan Ukuran bank, kepemilikan institusional, ukuran dewan pengawas syariah, dan umur perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i>, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan</p>
--	---	---	---

⁶³ Yogi Dwi Lestari, “Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan* 1, No.1 (2020).

			Islamic Social Reporting bank umum syariah di Indonesia”.
4.	Ilma Ikfiyani Skripsi Iain Salatiga 2020 ⁶⁴	“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel Moderating”	“Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018 serta Return On Equity tidak mampu memoderasi Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018 4 Return On Equity mampu memoderasi atau memperkuat Islamic Social Reporting terhadap nilai

⁶⁴ Ilma Ikfiyani, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Islamic Social Reporting terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel Moderating,” (Skripsi Iain Salatiga, 2020)

			perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018”.
5.	Iin Fitri Lesati dan Ulfi Kartika Oktaviana Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol.8 No.1 2020 ⁶⁵	“Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur)”	“Dari hasil penelitian menunjukkan variabel komite audit serta dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan”.
6.	Firman Setiawan Journal of Islamic Economics and Banking Vol.2 No.1 2020 ⁶⁶	“Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> ”	“Pada uji T yang dilakukan, Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> sedangkan pada uji F, Dewan

⁶⁵ Iin Fitri Lesati dan Ulfi Kartika Oktaviana, “Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur),” *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, No.1 (2020).

⁶⁶ Firman Setiawan, “Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*,” *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, No.1 (2020).

			Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> ”
7.	Wahyono, Eskasari Putri dan Bayu Tri Cahya Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol.21 No.2 2020 ⁶⁷	“Corporate Governance Strength, Firm’s Characteristics, and Islamic Social Report: Evidence From Jakarta Islamic Index”	“Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel corporate governance strength (CGS) dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ISR”.
8.	Susi Sih Kusumawardhany	“Pengaruh Komite Audit, Dewan	“Komite audit tidak

⁶⁷ Wahyono, Eskasari Putri dan Bayu Tri Cahya, “Corporate Governance Strength, Firm’s Characteristics, and Islamic Social Report: Evidence From Jakarta Islamic Index,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 21, No.2 (2020).

	dan yunita Kurnia Shanti ⁶⁸ Journal of information system, applied, management, accounting and research Vol.5 No.2 2020	Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”	berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan”
9.	Ratih Selvira Utami dan Siska Priyandani Yudowati ⁶⁹ e-Proceding of Management Vol. 8 No.2 2021	“Pengaruh Islamic Social Reporting, Peristensi Laba, dan Struktur Modal terhadap <i>Earning Response Coefficient</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) Periode 2014-2019)”	“Variabel <i>Islamic social reporting</i> , persistensi laba, dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap <i>Earning Response Coefficient</i> pada perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic</i>

⁶⁸ Susi Sih Kusumawardhany dan yunita Kurnia Shanti, “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019),” *Journal of information system, applied, management, accounting and research*5, No.2 (2020).

⁶⁹ Ratih Selvira Utami dan Siska Priyandani Yudowati, “Pengaruh Islamic Social Reporting, Peristensi Laba, dan Struktur Modal terhadap *Earning Response Coefficient* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2014-2019),” *e-Proceding of Management*8 No.2 (2021).

			<p><i>Index</i> tahun 2014-2019. Secara parsial variabel <i>Islamic social reporting</i> berpengaruh negative terhadap <i>Earning Response Coefficient</i>. Sedangkan variabel persistensi laba, dan struktur modal tidak berpengaruh terhadap <i>Earning Response Coefficient</i>”</p>
10.	<p>Jumaini Azizah dan Erinos NR⁷⁰</p> <p>Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.2 No.1 2020</p>	<p>“Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)”</p>	<p>“Dewan komisaris, komite audit dan dewan pengawas syariah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja perbankan syariah”</p>
11.	<p>Nazila Alfiyasahra dan Auliffi Ermian Challen⁷¹</p>	<p>“pengaruh Kualitas Komite Audit dan Ukuran</p>	<p>“komite audit berpengaruh terhadap</p>

⁷⁰ Jumaini Azizah dan Erinos NR, “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018),” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*2, No.1 (2020).

	Jurnal Akuntansi Indonesia Vol.9 No.1 2020	Kantor Akuntansi Publik terhadap Manajemen Laba”	manajemen laba tetapi ukuran kantor akuntansi publik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba”
12.	Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari dan Widiyanti Sudarno ⁷² e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol.5 No.2 2017	“Analisis pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)”	“Variabel ukuran komite audit, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR), sedangkan variabel ukuran dewan komisaris dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).
13.	Desak Made Ayu Shania Saraswati, I Wayan Sukadana,	“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan	“Profitabilitas, likuiditas dan leverage secara

⁷¹ Nazila Alfiyasahra dan Auliffi Ermian Challen, “Pengaruh Kualitas Komite Audit dan Ukuran Kantor Akuntansi Publik terhadap Manajemen Laba,” *Jurnal Akuntansi Indonesia*9, No.1 (2020).

⁷² Nindya Tyas Hasanah et al., “Analisis pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR),” *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*5, No.2 (2017).

	dan I Wayan Widayana ⁷³ Values Vol.1 No.4 2020	Leverage terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Properti dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	simultan berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i> pada perusahaan properti dan <i>real estate</i> ”
14.	Salina, Nur Diana, dan M.Cholid Mawardi ⁷⁴ E-JRA Vol.10 No.2 2021	“Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia (Periode 2017-2019)”	“Secara simultan menunjukkan kualitas penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap ROA, NIM dan beban operasional terhadap pendapatan operasional”
15.	Isnan Murdiansyah ⁷⁵ Malia: Jorunal of Islamic Banking and Finance Vol.5 No.1 2021	“Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Islamic Social	“Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, namun ukuran dewan komisaris berpengaruh

⁷³ Desak Made Ayu Shania Saraswati et al., “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Kondisi *Financial Distress* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Values*1, No.4 (2020).

⁷⁴ Salina et al., “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia (Periode 2017-2019),” *E-JRA*10, No.2 (2021).

⁷⁵ Isnan Murdiansyah, “Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR),” *Malia: Jorunal of Islamic Banking and Finance*5 No.1 (2021).

		Reporting (ISR)”	positif signifikan terhadap pengungkapan ISR, dan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR”
16.	Lakharis Inuzula, Hasan Basri dan Shabri ⁷⁶ Jurnal Magister Akuntansi Vol.4 No.4 2015	“Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris dalam Mengungkapkan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia”	“Dewan pengawas syariah dan dewan komisaris secara simultan memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2013 sedangkan secara parsial dewan pengawas syariah tidak memiliki peran yang signifikan, tetapi dewan komisaris memiliki peran yang signifikan dalam mengungkapkan

⁷⁶ Lakharis Inuzula et al., “Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris dalam Mengungkapkan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” *Jurnal Magister Akuntansi*4 No.4 (2015).

			<i>Islamic social reporting</i> pada bank umum syariah tahun 2010-2013”
17.	Wardatul Baidok dan Dina Fitriisa Septiarini ⁷⁷ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan Vol.3 No.12 2016	“Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi dan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Indeks <i>Islamic Social Reporting</i> pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”	“Dewan komisaris, Komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan frekuensi rapat komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ISR pada bank umum syariah di indonesia”
18.	Siti Sara Rostiani dan Tuntun A. Sukanta ⁷⁸ Jurnal Akuntansi Bisnis dan	“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan <i>Islamic Social</i>	“Dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap

⁷⁷ Wardatul Baidok dan Dina Fitriisa Septiarini, “Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi dan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan*3 No.12 (2016).

⁷⁸ Siti Sara Rostiani dan Tuntun A. Sukanta, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016),” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*4, No.2, 2018.

	Ekonomi Vol.4 No.2 2018	<i>Reporting</i> (ISR) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”	pengungkapan ISR, sedangkan profitabilitas dan leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR”
19.	Maya Ariska, Muhammad Fahu, dan Jaka Wijaya Kusuma ⁷⁹ Jurnal Revenue Vol.1 No.1 2020	“Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019”	“Variabel leverage dan ukuran perusahaan tidak ada pengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance”
20.	Lucky Lukman dan Mohammad Solihin ⁸⁰ Jurnal Ekonomi Vol.20 No.2 2018	“Pengaruh Economic Value Added, Financial Leverage dan Profitabilitas terhadap Harga Saham PT. Summarecon	“ <i>Economic value added</i> (EVA), <i>fimancial leverage</i> (<i>debt to equity ratio</i>), profitabilitas asset dan profitabilitas

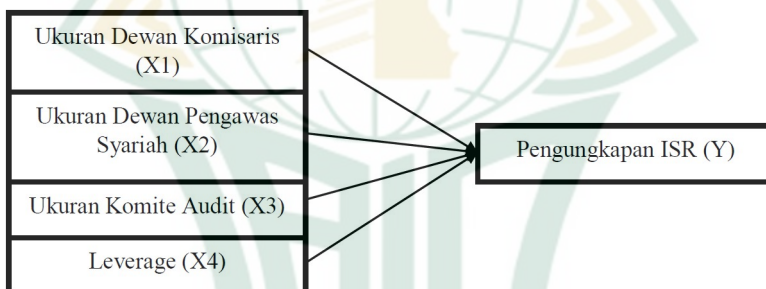
⁷⁹ Maya Ariska et al., “Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019,” *Jurnal Revenue* 1 No.1 (2020).

⁸⁰ Lucky Lukman dan Mohammad Solihin, “Pengaruh Economic Value Added, Financial Leverage dan Profitabilitas terhadap Harga Saham PT. Summarecon Agung Tbk,” *Jurnal Ekonomi* 20 No.2 (2018).

		Agung Tbk”	equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT. Summarecon Agung Tbk”
--	--	------------	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah gabungan tentang ikatan antar variabel yang disusun dari bermacam teori yang telas dijabarkan. Bersumber pada teori yang sudah dipaparkan, berikutnya dianalisis secara kritis serta sistematis, sehingga menciptakan gabungan tentang ikatan antar variabel yang diteliti. Gabungan tentang ikatan tersebut berikutnya digunakan buat merumuskan hipotesis.⁸¹



D. Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sedangkan terhadap rumusan permasalahan riset, dimana rumusan permasalahan riset sudah dinyatakan dalam wujud kariat persoalan. Dikatakan sedangkan, sebab jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta- fakta empiris yang diperoleh lewat pengumpulan informasi. Jadi, hipotesis pula bisa dinyatakan selaku jawaban teoritis terhadap rumusan permasalahan riset, belum jawaban yang empirik dengan informasi. Hipotesis bersalah dari kerangka berfikir yang menjabarkan antara kedua variabel

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

yang hendak ditelitinya.⁸² Dari kerangka berfikir yang dijabarkan tadinya, hingga hipotesis yang diajukan merupakan:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Sebagaimana dikutip dalam “Peraturan OJK No.33/PJOK.04/2014 dewan komisaris merupakan organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat terhadap direksi. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan”.⁸³

Dewan komisaris memegang peran yang penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance (GCG). Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Lila Pratiwi dan Firman setiawan menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*.

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Afabeta, 2015), 96.

⁸³ Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia, “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017),” *Jurnal Ilmiah dan Akuntansi* 17, No.2 (2019), 145.

⁸⁴ Agustomi, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Cross-Directorship Dan Liputan Media Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Bank Umum Syariah Periode 2016-2018,” (Skripsi Uin Raden Intan Malang, 2019) 40.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi dan mengawasi kegiatan bank supaya sesuai dengan prinsip islam. Dalam surat keputusan direksi bank indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, dijelaskan bahwa bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank.⁸⁵

Dewan pengawas syariah merupakan salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional, dengan fungsi utamanya yaitu mengawasi kegiatan operasional yang telah sesuai dengan aturan syariah sebagai justifikasi penting dalam perbankan keuangan islam.⁸⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Dwi Lestari dan Iin Fitri Lesati dkk menyatakan “bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*”.

H2: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*.

3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Islamic Social Reporting (ISR)*

Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris terkait dengan audit internal dan eksternal. Sehingga fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang komite audit. Sebagai penanggung jawab atas audit maka anggota komite audit harus independen, profesional dan objektif

⁸⁵ Iin Fitri Lestari dan Ulfi Kartika Oktaviana, “Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, No.1, (2020), 31.

⁸⁶ Iin Fitri Lestari dan Ulfi Kartika Oktaviana, “Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur,” 31.

dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam mengambil keputusan.⁸⁷

Pembentukan komite audit bersifat dapat dibentuk tidak bersifat keharusan, sehingga terserah sepenuhnya oleh kebijakan dan pertimbangan dewan komisaris. Namun khusus bagi emiten atau perusahaan publik harus memiliki komite audit.⁸⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fitri Lesati dkk menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan dengan hutang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang maupun pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal.⁸⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Tanti Safitri menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

H4: *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

⁸⁷ Iin Fitri Lestari dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur," 32.

⁸⁸ Eva Rozana, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak," (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2020) 8.

⁸⁹ Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia, "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)," 146.